

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Investasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah<sup>1</sup>. Pembangunan wilayah dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkesinambungan melalui kegiatan investasi baik yang bersumber dari dalam atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun luar negeri atau Penanaman Modal Asing (PMA). Oleh karena itu, untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka dibutuhkan investasi pada semua sektor pembangunan. Besarnya investasi ini akan tergantung pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun dari sektor swasta dan masyarakat. Investasi daerah merupakan salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Secara normatif, investasi daerah (*local investment*) dipahami sebagai salah satu kekuatan penting untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Tak terkecuali di kalangan pemerintah daerah, timbul semacam kesadaran, terlebih sesudah implementasi desentralisasi dan otonomi

---

<sup>1</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia 2012, *Laporan Perkembangan Investasi PMA dan PMDN Triwulan I 2012* ( diakses pada tanggal 23 agustus)

daerah bahwa akselerasi pembangunan hanya dimungkinkan jika terdapat arus investasi yang signifikan<sup>2</sup>.

Selama ini kontribusi investasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap investasi agregat di wilayah DKI Jakarta masih sangat rendah (BPM dan PKUD DKI Jakarta, 2007). Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai kontribusi aktual tahun 2002 hingga 2006 dimana investasi Pemprov DKI Jakarta terhadap investasi agregat di DKI Jakarta memiliki kecenderungan menurun dan hanya berada pada kisaran 5,5 persen hingga 6,6 persen<sup>3</sup> (Tabel 1.1). Rendahnya investasi pemerintah tersebut disebabkan masih banyaknya program yang harus dibiayai oleh pemerintah sehingga dana yang dialirkan untuk investasi menjadi berkurang.

**Tabel 1.1 Kontribusi Pemprov DKI Jakarta dalam Investasi Agregat di Provinsi DKI Jakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Kontribusi Pemprov DKI Jakarta (dalam persen)</b>
2002	6,58
2003	6,69
2004	5,19
2005	5,28
2006	5,56

Sumber : BPM dan PKUD DKI Jakarta, 2002-2006

<sup>2</sup> Dedi Haryanto, "Peranan Investasi Pertanian dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pemerintahan", Jurnal Manajemen ISSN 2085-1596,p.24-33

<sup>3</sup> BPM dan PKUD DKI Jakarta 2012rrr ,Laporan Perkembangan Investasi DKI Jakarta 2004-2012, (diakses tanggal 7 agustus 2014)

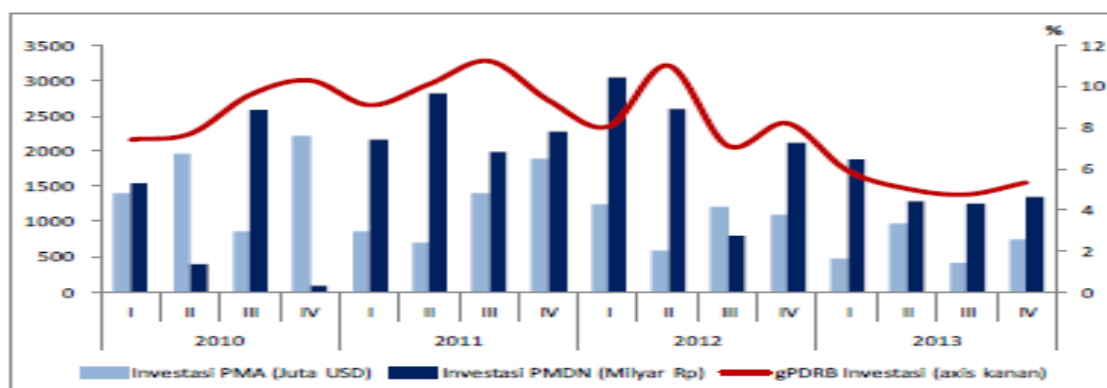
Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan pertumbuhannya sebesar 6,5 persen pada tahun 2007 maka membutuhkan investasi sebesar Rp 123 triliun. Hal ini disebabkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia saat ini sebesar 5 persen. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan upaya perbaikan sistem investasi. Misalnya, mempercepat proses perizinan investasi, penyederhanaan pembiayaan, dan membuka pelayanan dengan satu pintu (BPM dan PKUD Provinsi DKI Jakarta, 2007). Investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat masuk ke suatu wilayah apabila para investor merasa aman dalam melakukan kegiatan investasi.

**Tabel 1.2 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN di DKI Jakarta**

Tahun	Proyek	Investasi
2006	29	3.088
2007	34	4.218
2008	34	1.837
2009	35	9693,8
2010	86	4.599
2011	84	9.256
2012	72	8.540
2013	156	5.755

Sumber: BKPM (data diolah)

PMDN di DKI Jakarta cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008 Investasi di DKI Jakarta mengalami penurunan karena disebabkan adanya krisis ekonomi global dan di tahun 2013 investasi di DKI Jakarta mengalami penurunan kembali sebesar 5.755. Dalam melakukan kegiatan investasi di Provinsi DKI Jakarta, selama ini para investor dihadapi dengan adanya kendala-kendala seperti tidak adanya kepastian hukum, tidak adanya kepastian waktu proses perizinan, hingga tidak adanya kepastian biaya. Kendala-kendala tersebut menyebabkan berkurangnya kepercayaan investor baik asing maupun domestik untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor, pemerintah mengesahkan undang-undang di bidang penanaman modal yaitu Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi DKI Jakarta untuk periode selanjutnya akan semakin meningkat.



**Gambar 1.1 Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi DKI Jakarta**

Realisasi investasi dari sumber Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan II 2013 mengalami penurunan. Dari target total investasi sebesar Rp59,07 triliun dalam tahun 2013, realisasi investasi di Jakarta hingga akhir semester I 2013 diperkirakan baru mencapai Rp17,6 triliun atau sekitar 30% dari yang ditargetkan. Investasi PMDN mencapai Rp1,3 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun apabila dibandingkan dengan realisasi pada 2 tahun terakhir. Jumlah proyek investasi PMDN juga mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, realisasi investasi PMDN pada triwulan II 2013 mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan I 2013. Hal tersebut sejalan dengan penurunan indeks ekspektasi kegiatan dunia usaha yang terjadi semenjak awal tahun 2013 sebagai pengaruh dari sentimen negatif pelaku usaha dan investor domestik terhadap kondisi perekonomian domestik<sup>4</sup>. Sementara itu, investasi dari sumber Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan laporan mengalami peningkatan yang ditengarai sebagai dampak dari berlanjutnya kebijakan stimulus di negara maju yang mendorong ketersediaan dana investasi. Realisasi investasi PMA di triwulan II 2013 sebesar USD960.7 juta dengan total jumlah proyek sebanyak 872 proyek. Investasi PMA hingga triwulan laporan terfokus pada sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi yang dianggap prospektif di Jakarta dan didominasi oleh negara Singapura, Belanda dan Jepang.

---

<sup>4</sup> Analisa Ekonomi dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Triwulan II – 2013, ( diakses pada tanggal 11 September 2014)

Jalannya kegiatan investasi dipengaruhi oleh banyaknya faktor. Apabila terdapat permasalahan atau kelemahan di salah satu faktor maka akan mempengaruhi kegiatan investasi secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), suku bunga, nilai tukar, inflasi, dan perkembangan teknologi.

Faktor pertama yang mempengaruhi investasi adalah PDRB. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat meningkatkan investasi ternyata tidak mampu merealisasikan harapan. Pada sektor industri pengolahan misalnya, menurut berbagai kalangan pemerintah Indonesia belum serius mendorong investasi. Padahal, sektor investasi dalam negeri merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta dari tahun 2006-2013.

**Tabel 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 2000-2013 (Milyar Rupiah)**

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan (%)
2006	312826,71	5,95
2007	332971,25	6,44
2008	353723,39	6,23
2009	371469,50	5,02
2010	395622,44	6,50
2011	422242,25	6,73
2012	449805,42	6,53
2013	477285,25	6,11

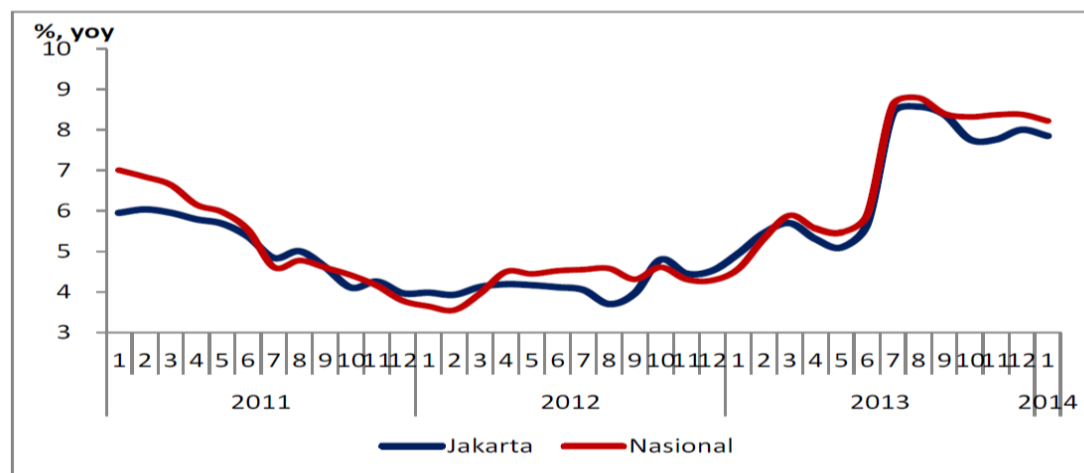
Sumber : Badan Pusat Statistik RI 2013(data diolah)

Berdasarkan data yang dapat dilihat di Tabel 1.3, PDRB DKI Jakarta mengalami peningkatan sepanjang tahun 2001-2011. Peningkatan tersebut bergerak secara fluktuatif dan menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan dalam perekonomian. PDRB di DKI Jakarta mengalami penurunan tahun 2009 di setiap wilayah itu dikarenakan adanya krisis global dunia pada tahun 2008 yang berdampak pula pada tahun 2009 tetapi meskipun mengalami pertumbuhan pada tahun 2013 laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2013 mengalami perlambatan itu dikarenakan adanya kenaikan harga BBM dan faktor lain yang mempengaruhi.

Faktor kedua adalah suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit yang rendah, kompetitif dan stabil akan menarik minat investor untuk melakukan ekspansi atau pembukaan usaha baru karena terjadi pengurangan beban bunga. Dalam hal ini, BI rate dijadikan sebagai suku bunga acuan bagi penetapan suku bunga simpanan dan kredit. Tingkat BI rate yang rendah akan berimbas pada rendahnya suku bunga kredit karena suku bunga simpanan sebagai basis sumber dana perbankan juga akan berada pada posisi yang lebih rendah. Sepanjang tahun 2013, BI rate mengalami kenaikan bertahap yaitu berada pada posisi 7,50 bps, nilai ini beranjak naik mulai dari bulan November 2013 dimana sebelumnya berada pada posisi 5,75 (Januari 2013). Adanya kenaikan BI Rate ini memberikan pengaruh pada trend kenaikan suku bunga kredit investasi. Data Bank Indonesia menunjukkan posisi suku bunga kredit pada bulan Januari 2013 sebesar 11,75 persen meningkat di bulan Desember 2013 menjadi 12,51 persen.

Faktor ketiga adalah tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Inflasi yang tinggi dan fluktuatif menggambarkan ketidakstabilan dan kegagalan pengendalian kebijakan makro ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi dan fluktuatif membuat investor dihadapkan pada situasi ketidakpastian usaha yang memicu peningkatan resiko proyek dalam investasi.

**Gambar 1.2 Inflasi Jakarta dan Nasional**



Tekanan inflasi Jakarta kembali ke pola normalnya pada triwulan akhir 2013 setelah mengalami tekanan pada tiwulan III 2013 sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi Jakarta pada triwulan IV 2013 tercatat sebesar 0,88% (qtq). Dengan demikian, inflasi Jakarta untuk keseluruhan tahun 2013 sebesar 8,00% (yoy). Realisasi inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jakarta pada triwulan sebelumnya maupun inflasi nasional 2013 sebesar 8,38%(yoy). Kecuali pada triwulan I 2013 , inflasi Jakarta berada dibawah rata-rata inflasi nasional.



Faktor keempat adalah nilai tukar. Dalam penelitiannya, Krisna menyatakan dimana dengan terjadinya peningkatan kurs dollar maka investor didalam negeri memiliki kemampuan berinvestasi lebih sedikit, sehingga investasi berkurang. Apabila nilai kurs dollar meningkat, maka investasi berkurang.<sup>5</sup>

**Tabel I.3**  
**Kurs USD (\$) terhadap Rupiah (Rp) pada tahun 2007 – 2012**

<b>Tahun</b>	<b>Kurs Rupiah</b>
2007	Rp 9.419
2008	Rp 10.950
2009	Rp 9.400
2010	Rp 8.991
2011	Rp 9.068
2012	Rp 9.670

Sumber : Statistik Ekonomi Indonesia (SEKI), tahun 2013

Keadaan dollar yang fluktuatif dan cenderung naik tersebut tentu bukan tanpa dampak dan efek, jika nilai tukar meningkat keadaan tersebut membuat investor membuat memilih untuk berinvestasi bila keadaan nilai tukar telah stabil.

Faktor kelima perkembangan teknologi, kemajuan teknologi menjadi salah satu faktor untuk mengadakan investasi. Penemuan-penemuan teknologi baru dalam proses produksi, misalnya penciptaan mesin baru, serta pembaharuan-pembaharuan atau perbaikan-perbaikan dalam proses produksi sangat berpengaruh dalam mempertinggi produktivitas di berbagai bidang kegiatan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya ongkos produksi per satuan produk dan perbaikan mutu produk, sehingga dapat meningkatkan laba yang diharapkan . Kenaikan produktivitas

---

<sup>5</sup>Ni Made Krisna Marselar “*Pengaruh Tingkat Inflasi, PDRB, Suku Bunga Kredit, serta Kurs Dollar Terhadap Investasi*”, Universitas Udayana: Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 3 No. 3, Maret 2014, p. 78

ini memungkinkan pula pertambahan produksi yang tinggi sehingga kegiatan ekonomi berkembang lebih cepat. Selain itu kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan para pekerja sehingga permintaan dan pengeluaran rumah tangga meningkat pula. Hal ini akan mendorong para pengusaha menambah investasinya.

Secara umum kondisi berbagai wilayah di Provinsi DKI Jakarta oleh para pelaku usaha dinilai relatif kondusif untuk melaksanakan kegiatan investasi. Investasi diyakini mampu meningkatkan perekonomian dari suatu wilayah. Oleh karena itu, hal yang wajar apabila pemerintah daerah berusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di wilayah yang dikelolanya. Berbagai strategi diterapkan pemerintah daerah untuk menarik minat investor, seperti penyediaan lahan, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan. Selain itu, persaingan antar daerah semakin ketat dalam menarik para investor sehingga pemerintah daerah harus mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing yang berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia, serta sumberdaya lainnya untuk menarik minat investor.<sup>6</sup>

Kegiatan investasi suatu wilayah dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika salah satu faktor tersebut mengalami suatu kendala maka akan berpengaruh terhadap kegiatan investasi di wilayah tersebut. Selain itu, investasi akan meningkat apabila tercipta iklim investasi yang kondusif dan meningkatnya daya saing wilayah tersebut sebagai

---

<sup>6</sup> Suryanto, *Pertumbuhan Investasi Nasional Rendah*, 2011, (<http://www.antaraneews.com/berita/271843/pertumbuhan-investasi-nasional-rendah> ), diakses tanggal 22 Agustus 2014)

tujuan investasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi investasi di DKI Jakarta sebagai upaya pembangunan dan pengembangan kegiatan investasi di DKI Jakarta.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dikemukakan identifikasi masalah faktor – faktor yang mempengaruhi investasi dalam negeri (PMDN), antara lain :

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh suku bunga kredit terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?
4. Apakah terdapat pengaruh nilai tukar rupiah terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?
5. Apakah terdapat pengaruh teknologi terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, masalah investasi dalam negeri memiliki penyebab yang luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini dibatasi pada masalah: “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Suku Bunga terhadap Investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta.”

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh suku bunga terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta ?
2. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional (PDRB) terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta ?
3. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Suku Bunga terhadap investasi dalam negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta?

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan kegunaan bagi semua pihak, yang mana kegunaan ini secara umum terbagi menjadi dua yaitu :

### 1. Kegunaan teoretis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dan informasi dalam bidang ekonomi khususnya mengenai seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Suku Bunga terhadap Investasi dalam negeri (PMDN), sehingga penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

### 2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah kegiatan pembangunan perekonomian di Provinsi DKI Jakarta.